



Kemerdekaan Visual Terampas

MARAKNYA atribut-atribut berbau politik yang terpasang di sudut-sudut Kota Yogyakarta mendapat sorotan dari Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta, Dr. Sumbo Tinarbuko. Tidak tanggung-tanggung, dia menegaskan jika fenomena tersebut sebagai semacam teroris visual di ruang publik, yang tidak berhenti mengusik warga di manapun berada.

Dampak visual atas fenomena itu, katanya, tembok bangunan *heritage*, komersial, sekolah,

rumah sakit, bahkan rumah ibadah, seakan menjadi galeri terbuka sebagai ruang iklan. Entah itu untuk memasang atau menempelkan iklan luar ruang bersifat politik dari partai atau bakal calon legislatif, maupun komersial yang mempromosikan aneka barang dan jasa.

"Promosi produk, barang, dan jasa komersial itu sekarang mulai disaingi iklan politik. Reklame politik itu memasang secara

● ke halaman 11

Kemerdekaan

● Sambungan Hal 1

masif alat peraga kampanye (APK) di ruang-ruang publik," tegas Sumbo. "Bentuknya berupa bendera partai, wajah anggota dewan petahana, hingga wajah calon anggota dewan. Hal itu, masih ditambah lagi dengan calon wali kota, bupati, maupun calon presiden," tambahnya.

Masalahnya kemudian, ketika sebuah kota telah dirimbuni aneka ragam baliho dan teman-temannya, maka warga tidak akan bisa lari. Dalam arti, warga tidak bisa lagi bersembunyi dari penetrasi iklan komersial dan pro-

paganda politik, sehingga gerak langkahnya berada di bawah kendali cengkeraman deretan teroris visual tersebut. "Yang terjadi saat ini, visual, jendela visual dan horizon visual warga masyarakat dibatasi oleh kuasa tanda dan simbol media iklan luar ruang dalam bentuk kuasa visual iklan politik dan komersial," terangnya.

Sumbo mengungkapkan, teroris visual yang tampil dalam wujud sampah visual iklan politik dan komersial itu, nyaris tidak menyisakan ruang publik yang kosong. Parahnya lagi, menurutnya, cara pemasangannya pun cenderung asal-asalan saja, tanpa memperhatikan este-

tika dan kenyamanan warga masyarakat yang setiap hari dipaksa melihat pemandangan itu.

"Mending kalau cara pemasangannya *nyeni*, yang terjadi justru tumpang tindih dan *pating slawir* (semrawut). Sikap arogansi itu menyebabkan terjadinya obesitas pesan komersial dan politik di ruang publik," urainya. "Ujungnya, penetrasi iklan komersial dan propaganda politik jadi teroris visual yang bekerja untuk melakukan teror terhadap kemerdekaan visual yang menjadi hak dari penduduk di ruang publik," lanjut Insiator Reresik Sampah Visual dan pemerhati budaya visual itu.

Sehingga, mau tidak mau, pejabat publik yang diberi amanah memimpin dinas terkait dengan masalah sampah visual iklan politik, wajib menegakkan perda yang mengatur penyelenggaraan reklame di ruang publik. Jika perlu, sanksi tegas dijatuhkan, termasuk dari penyelenggara pemilu, agar karut marut sampah visual iklan politik perlahan dapat tereduksi. "Aturan wajib ditegakkan, demi terwujudnya ruang publik yang bebas dari terpaan teroris visual berujud iklan politik dan bendera parpol. Pemerintah harus menghadirkan kemerdekaan visual bagi warga penghuni kota," ujarnya. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005